

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, UKURAN PEMERINTAH
DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KARISIDENAN PATI TAHUN
2015-2021**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Akuntansi Syariah



Disusun oleh:

Irsyad Ariq Luqman

1905046083

**PRODI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2023**

MOTTO

“Apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu”

(Umar bin Khattab)

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Qs. Al-Baqarah 2:286)

Semua sudah Allah atur, jangan takut gagal, Allah sangat bisa memudahkan segala urusan secara tiba-tiba

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Puji Syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa pula shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan penuh rasa syukur dan bahagia atas terselesaikannya skripsi ini, maka penulis ingin mempersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku yang saya cintai dan kasihi Bapak Muslihan dan Ibu Purwati yang telah sepenuh hati membesarkan serta mendidik saya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang. selalu memberi semangat dan selalu mengirimkan doa-doa terbaiknya untuk kesuksesan anaknya-anaknya.
2. Saudara dan saudariku tercinta teman kelas Akuntansi C 2019 yang telah memberikan *supportnya* dan terimakasih telah menjadi penyemangat dalam setiap langkah pendidikanku hingga menempuh jenjang sarjana ini.
3. Terimakasih kepada saudara/saudari teman kos sumoro, freni anggoro, farida ainurrohmah, anifatus sholikhah yang telah menemani proses masa perkuliahan dan telah menjadi tempat berkeluh kesah dalam proses dinamika pengerjaan skripsi ini.
4. Untuk keluarga besar ukm ebisport terimakasih sudah kebersamai dan menjadi tempat berproses selama di bangku perkuliahan.
5. Untuk teman-teman seperjuangan yakni Akuntansi 2019 terimakasih telah menjadi keluarga dan teman seperjuangan yang solid selama di bangku perkuliahan.
6. Teman-teman KKN Reguler 79 kelompok 08 yang telah kebersamai selama 45 hari

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Karisedenan Pati” adalah murni hasil pemikiran penulis yang belum pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Skripsi ini juga tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 9 Oktober 2023

Deklarator

Irsyad Ario Luqman

1905046083

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah hal yang krusial dalam skripsi. Sebab pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang pada aslinya ditulis dengan alfabet Arab wajib disalin kedalam alfabet latin. Guna menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu panduan transliterasi sebagai berikut:

A. Konsonan

ء = ‘	ش = z	ق = q
ب = b	ض = s	ك = k
خ = t	غ = sy	ه = l
ز = ts	ص = sh	م = m
ض = j	ذ = dl	ن = n
غ = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ح = h
د = d	ع = _	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ز = r	ف = f	

B. Vokal

ا = a

ي = i

و = u

C. Diftong

اي = ay

او = aw

D. Syaddah (ّ)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya طناة

al-thibb

E. Kata Sandang (ها----)

Kata sandang (ها....)ditulis dengan al-..... . Misalnya حائِصا = al-shina‘ah.

Al- ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta‘Marbuthah (ح)

Setiap ta‘marbuthah ditulis dengan —hll misalnya حَشَّكِيَا حَاطِنَا = alma‘isyah

al-thabi‘iyyah

ABSTRAK

Kinerja keuangan daerah merupakan suatu gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan program atau kegiatan suatu daerah yang dilakukan untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan selama jangka waktu tertentu. Pemerintah daerah memiliki peran kunci dalam pelayanan masyarakat, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya adalah kinerja keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sumber data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Karisidenan Pati tahun 2015- 2021. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Data Panel dengan Eviews 10. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah, berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, variabel dana perimbangan dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, dana perimbangan, kinerja keuangan daerah.

ABSTRACT

Regional financial performance is a description of the level of success in implementing regional programs or activities carried out to achieve the goals, vision and mission that have been set over a certain period of time. Regional governments have a key role in public services, one of the factors that greatly influences the ability of regional governments to carry out their duties is financial performance. This research aims to examine the influence of local original income, government size and balancing funds on regional government financial performance. This type of research is Quantitative research with secondary data sources in the form of the Pati Regional Government Financial Report for 2015-2021. The power analysis technique used is Panel Data Regression Analysis with Eviews 10. The results of the research show that the regional original income variable has a negative and insignificant effect on the government's financial performance regionally, the balancing fund variables and regional government size have a positive and significant effect on regional government financial performance.

Key words: local original income, regional government size, balancing funds, regional financial performance.

KATA PENGANTAR

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafa'atnya kelak di hari akhir. Skripsi berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Karisidenan Pati Tahun 2015-2021” ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dalam jurusan Akuntansi Syariah UIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini dapat selesai berkat bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Wakil Dekan I, II, III serta seluruh civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr.Ratno Agriyanto, M.Si.,A.Kt. Selaku Kepala Jurusan S1 Akuntansi Syariah dan Bapak Warno,S.E., M.Si. Selaku Sekretaris Jurusan S1 Akuntansi Syariah.
4. Bapak Dr.Ali Murtadho, M.Ag. Selaku pembimbing I dan Bapak Mashilal, M.Si. selaku pembimbing II yang telah bersedia dan senantiasa sabar untuk meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam memberikan bimbingan serta arahnya untuk penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar program S1 Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat saya

tulis satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan sehingga mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat dan menambah khazanah keilmuan terkhusus bagi penulis sendiri serta bagi para pembaca.

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
PERSEMBAHAN	iii
DEKLARASI	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1. Kajian Teori	11
2.1.1. Teori Agensi	11
2.1.2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	11
2.1.3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	15
2.1.4. Pendapatan Asli Daerah	18
2.1.5. Ukuran Pemerintah Daerah	20
2.1.6. Dana Perimbangan	21
2.1.7. Teori dalam Perspektif Islam	22
2.2. Penelitian Terdahulu	24
2.3. Kerangka Berfikir	27
2.4. Hipotesis Penelitian	27
2.4.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	27

2.4.2. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	28
2.4.3. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1. Jenis dan Data Penelitian.....	31
3.2. Poulasi Dan Sampel.....	31
3.3. Teknik Pengambilan Sampel.....	31
3.4. Metode Pengumpulan Data	32
3.5. Definisi Operasional.....	32
3.6. Teknik Analisis Data	34
3.6.1. Analisis Deskriptif	34
3.6.2. Metode Estimasi Data Panel	34
3.6.2.1 Common Effect Model (CEM).....	34
3.6.2.2 Fixed Effect Model (FEM)	34
3.6.2.3 Random Effect Model (REM)	35
3.6.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel	35
3.6.3.1 Uji Chow (F test)	35
3.6.3.2 Uji Lagrange Multipler (LM)	35
3.6.3.3 Uji Hausman	37
3.6.4 Uji Asumsi Klasik.....	37
3.6.4.1 Uji Multikolonieritas.....	37
3.6.4.2 Uji Heteroskedastisitas	37
3.6.5 Analisis Rregresi Data Panel	38
3.6.6 Penguji hipotesis	39
3.6.6.1 Koefisien Determinasi (R^2)	39
3.6.6.2 Uji Hipotesis (Uji Statistik t)	40
3.6.6.3 Uji F Uji signifikansi simultan	40
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1. Gambaran Umum Karisidenan Pati.....	41
4.2. Analisis Statistik Deskriptif.....	46
4.3 Uji Pemilihan Model	47
4.3.1. Hasil Uji Chow	48

4.3.2. Hasil Uji Lagrange Multipler.....	49
4.4. Uji Asumsi Klasik	50
4.4.1. Uji Multikoleniaritas.....	50
4.4.2. Heteroskedastisitas.....	50
4.5. Pengujian Regresi Data Panel	51
4.6. Uji Hipotesis.....	52
4.6.1. Hasil Uji-t	52
4.6.2. Hasil Uji F.....	53
4.6.3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	54
4.7. Pembahasan Hasil Penelitian.....	55
4.7.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan	57
4.7.2. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah (Size) Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.....	59
4.3.2 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.....	59
BAB V PENUTUP.....	61
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran-Saran	61
5.3 Keterbatasan Penelitian	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN LAMPIRAN	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Kinerja Keuangan Karisidenan Pati	8
Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	27
Gambar 4. 1 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif.....	46
Gambar 4. 2 Hasil Uji Chow	48
Gambar 4. 3 Hasil Uji Lagrange Multipler	49
Gambar 4. 4 Hasil Uji Heterokedasitas.....	51
Gambar 4. 5 Hasil Uji T.....	53
Gambar 4. 6 Hasil Uji F	54
Gambar 4. 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3. 1 Definisi Operasional	32
Tabel 4. 1 Laporan Keuangan Pendapatan Asli Daerah	42
Tabel 4. 2 Laporan Keuangan Pendapatan Asli Daerah	42
Tabel 4. 3 Laporan Keuangan Aset Pemerintah Daerah	43
Tabel 4. 4 Laporan Keuangan Aset Pemerintah Daerah	44
Tabel 4. 5 Laporan Keuangan Dana Perimbangan Pemerintah Daerah.....	45
Tabel 4. 6 Laporan Keuangan Dana Perimbangan Pemerintah Daerah.....	45
Tabel 4. 7 Uji Pemilihan Model	48
Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikorelasi.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kinerja keuangan merujuk pada kemampuan suatu entitas, dalam konteks ini pemerintah daerah, dalam mengelola sumber daya keuangan dan mencapai tujuan keuangan yang ditetapkan. Kinerja keuangan pemerintah daerah mencakup berbagai aspek, seperti pendapatan, pengeluaran, dan posisi keuangan secara keseluruhan. Pendapatan Kinerja keuangan pemerintah daerah melibatkan kemampuan mereka untuk mengumpulkan pendapatan dari berbagai sumber, seperti pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya.¹

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perumusan strategis suatu organisasi. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. “Kinerja keuangan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah”²

Pendapatan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena menjadi sumber pendanaan untuk membiayai pengeluaran mereka dan menyediakan layanan publik. Pengeluaran Kinerja keuangan pemerintah daerah juga terkait dengan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola pengeluaran. Hal ini meliputi penggunaan anggaran dengan baik, pengendalian pengeluaran yang efisien, dan alokasi dana yang tepat untuk program dan proyek yang mendukung pembangunan daerah dan kebutuhan masyarakat. Posisi keuangan pemerintah daerah mencerminkan kesehatan keuangan mereka dalam jangka panjang. Hal ini meliputi aspek seperti neraca keuangan, arus kas, dan kemampuan

¹ Anjelia Onibala, Tri Oldy Rotinsulu, and Ita Pingkan F. Rorong, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara,” *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 22, no. 2 (2021): 67–89

² *Ibid.*

membayar utang.³ Pemerintah daerah yang memiliki posisi keuangan yang solid memiliki daya tahan yang lebih baik dalam menghadapi tantangan keuangan dan dapat mengelola risiko yang terkait dengan kewajiban finansial.

Penilaian terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual dengan target atau standar yang ditetapkan. Tujuan akhir dari kinerja keuangan yang baik adalah untuk mencapai keberlanjutan keuangan jangka panjang, menyediakan layanan publik yang berkualitas, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam wilayah pemerintah daerah tersebut. Pemerintah daerah memiliki peran yang krusial dalam pengelolaan keuangan publik dan penyediaan pelayanan kepada masyarakat di tingkat lokal. Salah satu daerah di Jawa Tengah yang menjadi fokus penelitian ini adalah Karisidenan Pati. Karisidenan Pati terdiri dari beberapa kabupaten Pati, Kudus, Jepara, Blora, Rembang dan Grobogan.

Otonomi daerah memberikan kekuasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah mereka sendiri. Otonomi daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk menciptakan rencana keuangannya sendiri. Oleh karena itu, penerapan otonomi daerah memerlukan sistem desentralisasi yang terbuka, efektif, efisien dan akuntabel kepada Masyarakat.⁴ Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah sangat penting dilakukan, karena pemerintah pusat berharap dengan adanya kebijakan otonomi daerah pemerintah daerah dapat mengelola keuangannya secara lebih mandiri, sehingga proses pembangunan dapat segera diselesaikan tanpa harus menunggu bantuan dana dari pemerintah pusat.⁵

³ Winanda Chyntia Simamora and Gideon Setyo Budiwitjaksono, "Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 6, no. 2 (2022): 410.

⁴ Pengaruh Pendapatan, Asli Daerah, and D A N Leverage Terhadap, "Perimbangan , Ukuran Pemerintah Kinerja Keuangan Pemerintah" (2023).

⁵ M.Si Dwi Saraswati, S.Pd And Ca Yunita Sari Rioni, Se, M.Si, Ak, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah" (N.D.).

Kinerja Keuangan Daerah merupakan suatu gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan program atau kegiatan suatu daerah yang dilakukan untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan selama jangka waktu tertentu. Kinerja Keuangan Daerah yaitu kemampuan suatu daerah untuk menjalankan perekonomian yang ada sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung proses pembangunan daerah serta penyelenggaraan layanan kepada masyarakat.⁶

Penilaian kinerja pada sektor publik dapat diukur secara finansial dan non finansial. Salah satu cara untuk mengukur kinerja keuangan sektor publik pada aspek finansial adalah dengan analisis rasio keuangan. Pada instansi pemerintah, penilaian kinerja keuangan dengan menggunakan analisis rasio keuangan dilakukan berdasarkan data laporan keuangan pada pemerintah daerah berupa laporan akuntabilitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).⁷

Hasil perhitungan analisis rasio yang dilakukan pada laporan APBD dapat digunakan sebagai pedoman untuk penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah dari perspektif pengelolaan sumber daya keuangan. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diamanatkan tugas untuk melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka pemerintah daerah harus melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar untuk melakukan evaluasi pada kinerja keuangannya.⁸

Kinerja keuangan merupakan suatu pengukuran yang dapat digunakan untuk memastikan aturan keuangan dilaksanakan secara baik dan benar serta mampu mempertahankan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Penilaian yang tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah

⁶ I R A Polii et al., "Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value for Money," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 8, no. 4 (2020): 781–788.

⁷ Asmaul Azis, *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur)*, 2016, <http://ejournal.stiedewantara.ac.id/>.

⁸ Dwi Saraswati, S.Pd And Yunita Sari Rioni, Se, M.Si, Ak, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah."

sebelum pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di suatu daerah. Peningkatan kinerja keuangan daerah merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kemandirian dalam suatu daerah.

Kinerja keuangan pemerintah daerah pada penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio efisiensi keuangan daerah. Rasio efisiensi merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah dalam pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh perusahaan yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rasio efisiensi ini merupakan rasio yang menilai kemampuan perusahaan dalam prestasi kinerja yang dilakukan, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang diterima perusahaan. Rasio ini memberikan keuntungan tingkat keefektifitas manajemen suatu daerah.⁹

Sumber pendapatan daerah terdiri atas tiga komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh suatu daerah melalui pungutan kepada masyarakat berdasarkan peraturan daerah yang sesuai. Sumber Pendapatan Asli Daerah dapat berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain yang sah.

Pendapatan Asli Daerah mencakup aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, seperti tanah, properti, sumber daya alam, dan investasi. Kekayaan ini dapat berperan penting dalam mendukung kinerja keuangan pemerintah daerah di Karisidenan Pati. Keberadaan kekayaan yang signifikan dapat memberikan pemerintah daerah sumber pendapatan tambahan, baik melalui penjualan aset maupun pengelolaan investasi, yang pada gilirannya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah dan meningkatkan kinerja keuangan mereka.

⁹ Simamora and Budiwitjaksono, "Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020."

Tingkat kekayaan daerah merefleksikan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan setiap potensi menjadi sumber pembiayaan daerah. Oleh karena itu, seringkali PAD digunakan sebagai indikator tingkat kekayaan daerah dalam penelitian Eviniar Nugraeni dan Priyo Hari Adi pada tahun 2019. Peningkatan pendapatan asli daerah diharapkan menjadi stimulus peningkatan pertumbuhan ekonomi dan juga semakin memperkuat kemandirian pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pendanaan daerah. Oleh karena itu, kemampuan suatu daerah dalam menggali pendapatan asli daerah akan berpengaruh pada perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Selain itu, semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat menjadi rendah. Pemerintah daerah dapat menghasilkan jumlah pendapatan daerah yang besar jika memiliki jumlah kas yang cukup untuk membiayai program kerja yang telah dianggarkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan, sehingga akan tercapai kinerja keuangan yang baik.¹⁰

Penelitian terdahulu telah melakukan kajian terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, peneliti Dwi dan Notoen menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan yang menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maiyora menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah bukan merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perbedaan hasil penelitian menjadi gap riset penelitian ini.

Ukuran pemerintah daerah dapat diukur melalui indikator seperti jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat urbanisasi. Karisidenan Pati mencakup beberapa kabupaten yang memiliki perbedaan dalam ukuran dan kompleksitas tugas pemerintah daerah. Ukuran yang lebih besar umumnya berarti adanya

¹⁰ Dessy Riani and Junita Putri Rajana Hrp, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Leverage, Ukuran Pemerintahan, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Pada Provinsi Sumatera Utara," *Jurnal Akuntansi Audit Dan Perpajakan Indonesia (Jaapi)* 3, no. 1 (2022): 311–317.

tanggung jawab yang lebih besar dalam menyediakan pelayanan publik, infrastruktur, dan pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, ukuran pemerintah daerah di Karisidenan Pati dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan mereka. Ukuran pemerintah daerah direfleksikan dengan total aset ini menunjukkan sumber daya yang secara potensial dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah, pemerintah daerah dituntut memberikan pelaporan yang baik dan menyeluruh mengenai pengungkapan wajib dari aset-aset tersebut.

Ukuran pemerintah dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Apabila suatu daerah mempunyai aset yang besar, maka besar pula peluang pemerintah daerah untuk mendapatkan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan melakukan pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya daerah. Dengan aset yang besar, pemerintah daerah juga dituntut lebih akuntabilitas sehingga akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian terdahulu telah melakukan kajian terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, peneliti azis dan nugraheni adi menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan yang menunjukkan berpengaruh signifikansi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Renas dul muid menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah bukan merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perbedaan hasil penelitian menjadi gap riset penelitian ini.

Selain pendapatan asli daerah (PAD) dan ukuran pemerintah daerah dana perimbangan merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dalam bentuk transfer dana atau subsidi. Pendapatan ini dapat berasal dari berbagai sumber, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Alokasi Khusus (DAK).¹¹ Pendapatan antarpemerintah dapat menjadi faktor penting dalam mendukung keuangan

¹¹ Puspita Sari Surya Prabawati and Eva Wany, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi* XV, no. 1 (2018): 1.

pemerintah daerah di Karisidenan Pati. Tingkat pendapatan antar pemerintah yang diterima dapat berdampak signifikan pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan mereka dan menyediakan layanan publik yang memadai.

Dana perimbangan dalam penelitian ini dihitung dengan perbandingan antara total dana perimbangan dengan total pendapatan. Dana perimbangan ini diberikan kepada daerah karena setiap daerah mempunyai keunggulan dan potensi daerah yang berbeda dalam memperoleh pendapatan yang berasal dari daerahnya sendiri. Semakin besar dana perimbangan yang diterima maka akan membuktikan bahwa semakin kuat ketergantungan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya.

Penelitian terdahulu telah melakukan kajian terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, peneliti asmaul aziz dan gita menunjukkan bahwa dana perimbangan merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan yang menunjukkan berpengaruh signifikansi. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Natoen menunjukkan bahwa dana perimbangan bukan merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perbedaan hasil penelitian menjadi gap riset penelitian ini.

Pengukuran kinerja keuangan dapat diukur dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain membandingkan, pengukuran kinerja juga dapat menggunakan enam rasio yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam kinerja keuangan pemerintah yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas, *debt service coverage ratio*, dan rasio pertumbuhan.¹²

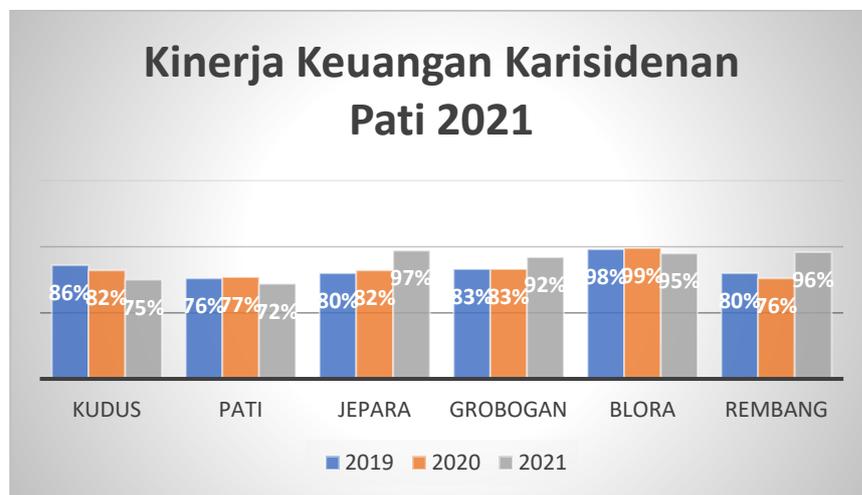
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja keuangan pemerintah sangatlah penting untuk dilakukan mengingat pengaruhnya terhadap publik. Pernyataan ini selaras dengan Greiling yang

¹² Polii et al., "Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value for Money."

mengungkapkan bahwa salah satu kunci sukses dari pembaharuan dalam sektor publik adalah dengan melakukan pengukuran kinerja.

Setelah melakukan analisis kinerja keuangan pada daerah di Karesidenan Pati yaitu Kabupaten Kudus, Pati, Jepara, Grobogan, Blora, dan Rembang menemukan bahwasanya 3 kabupaten yaitu mengalami penurunan kinerja keuangan pada tahun 2020 dan 2 kabupaten yaitu memiliki kinerja keuangan yang lebih baik daripada tahun 2019. Sedangkan Kabupaten Blora memiliki kinerja keuangan tidak berubah pada 2020.

Gambar 1. 1 Kinerja Keuangan Karesidenan Pati



Sumber: data diolah

Pada tahun 2019 Kabupaten Kudus memiliki rasio efisiensi sebesar 86% dan pada tahun 2020 memiliki rasio efisiensi sebesar 82% yang artinya pada tahun 2020 memiliki kinerja keuangan yang lebih efisien daripada 2019. Kabupaten Pati tahun 2019 memiliki rasio efisiensi 76% dan pada tahun 2020 memiliki rasio efisiensi sebesar 77% yang artinya terjadi penurunan kinerja keuangan pada tahun 2020. Kabupaten Jepara memiliki rasio efisiensi 80% dan tahun 2020 memiliki rasio efisiensi sebesar 82% yang artinya terjadi penurunan kinerja keuangan pada tahun 2020. Kabupaten Grobogan pada tahun 2019 dan 2020 memiliki rasio efisiensi sebesar 83% yang artinya kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Grobogan tetap. Kabupaten Blora pada tahun 2019 memiliki rasio efisiensi sebesar 98% dan tahun 2020 memiliki rasio efisiensi sebesar 99% yang artinya Kabupaten Blora

terjadi penurunan kinerja keuangan. Kabupaten rembang pada tahun 2019 memiliki rasio efisiensi sebesar 80% dan tahun 2020 memiliki rasio efisiensi sebesar 76% yang artinya Kabupaten Rembang pada tahun 2020 memiliki kinerja keuangan yang lebih efisien.

Penelitian ini sangat penting karena dapat menambah pengetahuan tentang administrasi publik dan akuntansi di sektor pemerintah yaitu yang berkaitan dengan perkembangan dari kinerja keuangan pemerintah daerah serta dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah di setiap periodenya guna untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian diatas judul penelitian ini ***PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, UKURAN PEMERINTAH DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KARISIDENAN PATI TAHUN 2015-2021***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Karisidenan Pati?
2. Bagaimana pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Karisidenan Pati?
3. Bagaimana pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Karisidenan Pati?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh pendaptan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Karisidenan Pati.
2. Untuk menganalisis pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Karisidenan Pati.
3. Untuk menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Karisidenan Pati.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, gambaran dan bukti empiris mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah(Pad), Ukuran Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan pemerintah daerah. Selain itu penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Pemerintah Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah kabupaten di karisidenan pati mengenai kinerja keuangan daerah agar dapat meningkatkan kinerja keuangannya.
 - b. Pihak masyarakat Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat maupun para *stakeholder* untuk mengetahui tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga dapat digunakan sebagai alat pengawasan mengenai kinerja pemerintah daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Teori Agensi

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori agensi. Dalam teori agensi terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan atau kontrak, yakni pihak yang memberikan kewenangan yang disebut principal dan pihak yang menerima kewenangan yang disebut agent.

Hubungan masyarakat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, yaitu hubungan yang timbul karena adanya kesepakatan yang ditetapkan oleh masyarakat (sebagai principal) yang menggunakan pemerintah (sebagai agent) untuk menyediakan jasa yang menjadi kepentingan masyarakat.¹³

Dalam organisasi sektor publik, khususnya di pemerintahan pusat dan daerah, secara sadar atau tidak, teori keagenan telah dipraktikkan. Masyarakat yang berada dalam posisi prinsipal memiliki hak untuk menilai dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah daerah yang telah diberi wewenang untuk mengelola anggaran dari masyarakat dituntut untuk menjadi agen yang mampu memenuhi harapan dan kepentingan masyarakat.

2.1.2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1. Definisi dan Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2005, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada, yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aset) dan/atau kewajiban suatu entitas pemerintah pada saat tertentu atau perubahan atas aset dan/atau kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan SAP. Laporan keuangan disusun untuk

¹³ Hendro Sumarjo, "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia," *Skripsi Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sebelas Maret. Surakarta* (2010): 1–76.

menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan.

Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai tujuan secara umum, Bastian menyebutkan bahwa tujuan umum dari pelaporan keuangan dalam pemerintah daerah yaitu menyediakan informasi yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan dan untuk mendemonstrasikan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercaya dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi persyaratan kasnya;
- c. Menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan entitas untuk mendanai aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban serta komitmennya;
- d. Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan didalamnya;
- e. Menyediakan informasi menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas atas hal biaya jasa, efisiensi dan pencapaian tujuan.

Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komprehensif. Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang berupa laporan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), Laporan Aliran Kas, dan Neraca Daerah.¹⁴ Laporan keuangan tersebut merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja keuangan pemerintah daerah.

Bagi pihak eksternal, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar

¹⁴ Adik Angel Siti Fatimah and Nunung Aini Rahmah, "Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan," *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 1, no. 3 (2022): 419–438.

pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Sedangkan bagi pihak intern pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian kinerja. Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi kepada publik.

2. Komponen Pokok Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2005, komponen pokok laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur seperti: pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada periode tertentu. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- 1) Kas dan setara kas
- 2) Investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang
- 3) Piutang pajak dan bukan pajak
- 4) Persediaan
- 5) Aset tetap
- 6) Kewajiban jangka panjang dan jangka pendek
- 7) Ekuitas

c. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi,

dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran.

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.

3. Karakteristik Kualitatif atas Informasi dalam Laporan Keuangan

Informasi akuntansi dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) harus mempunyai karakteristik kualitatif tertentu. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut Bastian karakteristik kualitatif merupakan ciri khas informasi dalam laporan keuangan yang berguna bagi pemakai. Terdapat empat karakteristik pokok, yaitu:

a. Dapat dipahami

Karakteristik utama kualitas informasi yang ditampung dalam laporan keuangan sektor publik adalah kemudahannya untuk dipahami pemakai.

b. Relevan

Informasi memiliki kualitas yang relevan apabila informasi tersebut mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dalam menilai peristiwa masa lalu dan masa kini, atau memperkirakan masa depan.

c. Keandalan

Informasi memiliki kualitas yang andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya.

d. Dapat diperbandingkan

Dapat diidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah entitas dari suatu periode ke periode lain pada entitas yang berbeda.¹⁵

2.1.3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

1. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.¹⁶ Kinerja merupakan aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Hamzah menjelaskan bahwa kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi.

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.¹⁷

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah gambaran pencapaian atas suatu program/kebijakan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah selama periode tertentu yang dapat diukur menggunakan indikator keuangan.

2. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja adalah proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan. Pengukuran kinerja secara berkelanjutan akan memberikan

¹⁵ Gita Maiyora, Pembimbing: Yusralaini, And Riska Natariasari, *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Studi Empiris Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera)*, Jom Fekon, Vol. 2, 2015.

¹⁶ Dessy Riani And Junita Putri Rajana Hrp, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Leverage, Ukuran Pemerintahan, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Pada Provinsi Sumatera Utara."

¹⁷ Azis, *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur)*.

umpan balik, sehingga terjadi upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai tujuan dimasa mendatang .

Pengukuran kinerja terhadap lembaga atau organisasi tidak hanya berlaku pada lembaga atau organisasi yang berorientasi profit saja, melainkan juga perlu dilakukan pada lembaga atau organisasi non komersial. Hal ini dilakukan dengan maksud agar dapat mengetahui sejauh mana pemerintah menjalankan tugasnya dalam roda pemerintahan dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan.¹⁸

Pengukuran kinerja dinilai sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan yang menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara ekonomis, efisien dan efektif. Masyarakat tentunya tidak mau terus menerus ditarik pungutan sementara pelayanan yang mereka terima tidak ada kualitas dan kuantitasnya.

Penelitian yang dilakukan Mandell mengungkapkan bahwa dengan melakukan pengukuran kinerja, pemerintah daerah memperoleh informasi yang dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan sehingga akan meningkatkan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat.

Salah satu cara yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan menggunakan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Menurut Halim menganalisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan

¹⁸ Polii et al., “Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value for Money.”

periode sebelumnya sehingga dapat diketahui kecenderungan yang terjadi.¹⁹

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD menurut Halim antara lain adalah sebagai berikut:

a. Rasio Kemandirian

Menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi. Menghitung rasio Kemandirian keuangan daerah berdasarkan APBD.

Rasio KKD= {(Pendapatan Asli Daerah)/(Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman)} x 100%

b. Rasio Efektivitas

Menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Menghitung rasio Efektifitas berdasarkan APBD Rasio Efektifitas= {(Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah)/(Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah)} x 100%

c. Rasio Efisiensi

¹⁹ Eviniar Nugraheni And Priyo Hari Adi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Meta-Analisis," *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* 20, No. 1 (April 30, 2020): 19–42.

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisien, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya.

Rasio efisiensi $= (\text{biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}) / (\text{Realisasi penerimaan PAD}) \times 100\%$

d. Rasio Aktivitas

Rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Rasio aktivitas merupakan rasio yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian dan kegiatan lainnya.

e. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR)

Rasio DSCR merupakan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah, bagian daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, penerimaan Sumber Daya Alam, dan bagian daerah lainnya, serta Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang telah jatuh tempo.

f. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.²⁰

2.1.4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang digali untuk digunakan sebagai modal dasar pemda dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Kemampuan suatu daerah menggali pendapatan asli daerah akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah

²⁰ Mirna Sesotyaningtyas, Jurusan Akuntansi, and Fakultas Ekonomi, "Accounting Analysis Journal," *AAJ* 1, no. 1 (2012), <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>.

tersebut. Disamping itu semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), maka kinerja pemerintah dianggap semakin baik.²¹

Untuk menjelaskan kemakmuran sebuah daerah. dalam penelitiannya Sumarjo memakai variabel kemakmuran dengan menggunakan proksi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan asli daerah yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa pemerintah daerah memiliki tingkat kemakmuran yang lebih tinggi dibandingkan daerah dengan pendapatan asli daerah yang masih rendah. Tingkat kemakmuran tentunya akan berdampak kepada tingkat kinerja yang lebih baik.²²

Dengan diberlakukannya desentralisasi membuat pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk memberdayakan seluruh potensi guna memperoleh pendapatan asli daerah yang tinggi. Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Menurut Halim, Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu :

1. Pajak daerah

Berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

2. Retribusi daerah

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh

²¹ Angel Siti Fatimah and Aini Rahmah, "Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan."

²² Sumarjo, "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia."

Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

4. Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah.

2.1.5. Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran pemerintah daerah sebagai salah satu variabel dalam menjelaskan struktur organisasi. Besar (ukuran) perusahaan dapat dinyatakan dalam total aset, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aset, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan. Ketiga variabel ini digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan karena dapat mewakili seberapa besar perusahaan tersebut.²³

Ukuran yang besar dalam pemerintah daerah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Selain itu kemudahan di bidang operasional juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja.

Dalam penelitian ini proksi untuk menjelaskan ukuran pemerintah daerah (size) adalah jumlah dari total aset pemerintah daerah. Aset yang dimiliki pemerintah daerah dapat mendukung kinerja pemerintah daerah. Aset yang besar diharapkan mampu memberikan kontribusi kinerja yang besar. Pemerintah daerah dengan aset besar diasumsikan memiliki potensi untuk memberikan pelayanan yang lebih terhadap masyarakat. Tuntutan dalam

²³ Dwi Saraswati, S.Pd And Yunita Sari Rioni, Se, M.Si, Ak, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah."

kinerjanya secara otomatis akan meningkat sesuai dengan nilai aset yang dimiliki.

2.1.6. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah sejumlah transfer dana dari pusat yang sengaja dibuat untuk membiayai program-program pemerintah daerah. Dana perimbangan ini merupakan hasil kebijakan pemerintah pusat di bidang desentralisasi fiskal demi keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah.

Salah satu tujuan pemberian dana perimbangan tersebut adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah agar tidak ada satu daerah yang tertinggal, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah. Dana perimbangan terdiri dari :

1. Dana Bagi Hasil (Pajak dan Sumber Daya Alam)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Dana Bagi Hasil dijelaskan sebagai dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam penjelasannya Dana Bagi Hasil pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah berupa pajak dan sumber daya alam.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikatakan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Pengertian Dana Alokasi Khusus diatur dalam Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa “Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”.²⁴

Dana alokasi umum (DAK) diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dengan kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang telah merupakan urusan daerah.²⁵

2.1.7. Teori dalam Perspektif Islam

1. Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi pemerintahan merupakan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menyusun suatu laporan keuangan. Tanpa adanya pedoman maka laporan keuangan yang dihasilkan tidak akan berkualitas dan tidak sesuai dengan aturan yang semestinya. Di dalam Islam dilarang melakukan suatu hal tanpa adanya pengetahuan maupun landasan hukum tentangnya. Seperti yang tertuang dalam Q.S. Al-Israa ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya : “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya”.

2. Kualitas Laporan Keuangan

²⁴ Prabawati and Wany, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015.”

²⁵ Ibid.

Kualitas laporan keuangan tidak terlepas dari empat karakteristik kualitatif pokok laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Dalam Al-Quran Allah telah menjelaskan bagaimana kita dalam membuat catatan atas suatu transaksi yaitu dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلَا يُؤْمَلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيهِ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka

dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.

Ayat di atas menjelaskan agar dalam mencatat transaksi haruslah dengan benar agar laporan yang dihasilkan relevan, dan tidak ada konsep tidak material dalam transaksi, baik kecil maupun besar haruslah tercatat dan diselesaikan sesuai jadwalnya.

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL,NAMA,TAHUN	METODE	HASIL
1.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran pemerintah daerah,dan leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kab/kota di Sumatera Utara. Dwi Saraswati dan Yunita Sari Rioni (2019).	Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif, Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan ukuran pemerintah daerah dan leverage berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan daerah.
2.	Pengaruh Karakteristik Pemerintahan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan Tahun 2013-2017). Ardiyanto, Ayu Febriyanti, Sarikadarwati Dan Susi Ardiani (2019).	Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif ,Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa population, pendapatan asli daerah,ukuran pemerintah daerah, berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah.

3.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Meta-Analisis. Eviniar dkk (2020)	Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif, Pendekatan meta-analisis digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis yang telah dibuat dan menjelaskan hasil perhitungan kembali yang telah dilakukan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD Berpengaruh Terhadap kinerja keuangan, belanja modal tidak Berpengaruh Terhadap kinerja keuangan, ukuran pemerintah daerah Berpengaruh Terhadap kinerja keuangan, Temuan audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, Leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
4.	Pengaruh Size, Wealth, Intergovernmental Revenue Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Lim,Nunuy,Arie (2019)	Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif, Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Size, Wealth, Intergovernmental Revenue Dan Belanja Modal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daaerah.
5.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan dan Balanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Prastiwi dan Aji (2020).	Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif, Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian ini bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan sedangkan Dana Keistimewaan dan Balanja Modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
6.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Papua. Mercy Irene(2020)	Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif, Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah,ukuran pemerintah,leverage,dana perimbangan berpengaruh pada kinerja keuangan.

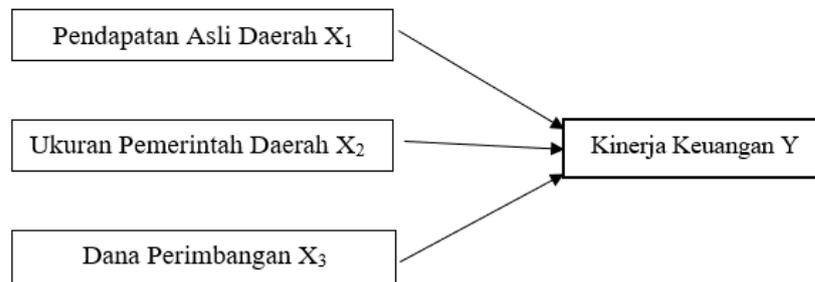
		adalah model analisis regresi linier berganda	
7.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Maulina, Alkamal, dan Fahira (2021).	Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif, model analisis menggunakan analisis regresi berganda	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan sedangkan Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Daerah tidak berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
8.	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Leverage, Ukuran Pemerintah Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan”. Dessy dan junita(2022)	Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif, Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Leverage, Ukuran Pemerintah Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
9.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Dan Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2013-2018. Nanda dan andri (2020)	Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif, Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan sedangkan dana perimbangan, dana keistimewaan dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
10.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Ester Trivona dan ikhsan budi (2021)	Penelitian ini menggunakan metode Kuantitatif, Model analisis data yang digunakan pada penelitian ini	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal berpengaruh Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah sedangkan dana perimbangan tidak

		adalah model analisis regresi linier berganda	berpengaruh terhadap kinerja keuangan
--	--	---	---------------------------------------

2.3. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis. Model dalam penelitian ini digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir



Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, dapat diketahui bahwa model penelitian ini terjadi secara satu arah untuk menjelaskan pengaruh pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

2.4. Hipotesis Penelitian

2.4.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

PAD (Pendapatan Asli Daerah) menjelaskan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) merupakan faktor pendukung dari kinerja ekonomi makro. Pertumbuhan yang positif mendorong adanya investasi

sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah daerah tersebut.

Kemampuan suatu daerah untuk menggali dan memanfaatkan potensi daerah untuk menghasilkan pendapatan asli daerah akan meningkatkan pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah yang dihasilkan daerah mendukung pertumbuhan sehingga pemerintah daerah mampu meminimalkan ketergantungan dana dari pemerintah pusat.²⁶

Meningkatnya pendapatan asli daerah akan berdampak pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari sasaran yang telah tercapai dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan pendapatan asli daerah. Tingginya pendapatan asli daerah juga dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah sehingga hal tersebut dapat berpengaruh pada kinerja keuangan daerah.²⁷

Uraian di atas didukung oleh hasil penelitian dari Mustikarini dan Fitriasari yang menemukan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Julitawati, et al dan Indrawan juga menemukan bahwa pendapatan Asli daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu hipotesis dari penelitian ini adalah:

H1 : Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Daerah.

2.4.2. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan utama dari program kerja Pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat sehingga harus

²⁶ Ni Putu Gina Sukma Antari and Ida Bagus Panji Sedana, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah," *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 7, no. 2 (2018): 1080.

²⁷ Ibid.

didukung oleh aset yang baik pula. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya dan fasilitas yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, semakin besar ukuran daerah yang ditandai dengan besarnya jumlah aset, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja Pemerintah daerah.

Ukuran pemerintah daerah dapat dijadikan tolak ukur dalam menentukan besar atau kecilnya pemerintah daerah, semakin besar pemerintah daerah maka akan semakin baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ukuran yang besar dapat mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah yang diikuti dengan meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah.²⁸

Aset yang dimiliki pemerintah daerah dapat mendukung kinerja pemerintah daerah. Aset yang besar diharapkan mampu memberikan kontribusi kinerja yang besar. Pemerintah daerah dengan aset yang besar seharusnya dapat memberikan pelayanan yang lebih terhadap masyarakat. Sehingga tuntutan kinerja akan meningkat sesuai dengan meningkatnya aset yang dimiliki.²⁹

Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian Sumarjo, Mustikarini dan Fitriyani serta Kusumawardani bahwa ukuran Pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Pemerintah daerah.

H3 : Ukuran Pemerintah Daerah Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

2.4.3. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana perimbangan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat terlaksana pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah akan memantau pelaksanaan dari dana perimbangan sehingga hal ini memotivasi Pemerintah daerah untuk berkinerja lebih baik. Dengan

²⁸ Angel Siti Fatimah and Aini Rahmah, "Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan."

²⁹ Antari and Sedana, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah."

demikian, semakin tinggi ketergantungan Pemerintah daerah pada pemerintah pusat maka diharapkan semakin baik pelayanan Pemerintah daerah kepada masyarakatnya sehingga kinerja Pemerintah daerah juga semakin meningkat.

Dana perimbangan cukup berperan penting dalam pelaksanaan keuangan daerah. Realisasi belanja daerah lebih tinggi dari pendapatan daerah akan menyebabkan terjadinya defisit, karena tidak semua daerah memiliki potensi yang sama untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah. Sehingga dana perimbangan dapat menjadi sumber tambahan keuangan bagi daerah.³⁰

Daerah dengan sumber daya yang rendah membutuhkan bantuan dana untuk dapat mencapai standar pelayanan yang minimum. Dengan demikian, dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan menunjukkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan daerahnya. Sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi menurun.

Uraian di atas didukung oleh penelitian dari Sumarjo, Marfian, Kurniasih dan Maiyora yang hasilnya menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di. Oleh karena itu hipotesis ketiga dari penelitian ini adalah:

H2 : Dana Perimbangan Berpengaruh Positif Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

³⁰ I Gusti Anggara Tama, “Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah , Ukuran Pemerintah , Dan Temuan Audit Terhadap Kinerja Keuangan Daerah I Gusti Made Ary Anggara Tama Pendahuluan Paradigma Pengelolaan Pemerintah Daerah Memulai Babak Baru Seiring,” *Perspektif Akuntansi* 1, no. Oktober (2018): 91–113.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Data Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka) yang dapat dianalisis dengan menggunakan analisis statistik. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) berupa laporan keuangan pemerintah daerah.

3.2. Poulasi Dan Sampel

Pengertian populasi menurut Sugiyono adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah yang berada di Provinsi Karisidenan pati yaitu sebanyak 6 kabupaten.

3.3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan Menurut Sugiyono Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Maka dari itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili.

Sampling Jenuh adalah teknik pemilihan sampel apabila semua anggota populasi dijadikan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik Sampling Jenuh, dimana semua populasi dalam penelitian ini dijadikan sampel.³¹

3.4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode dokumenter. Dimana pada metode ini peneliti melakukan pencatatan dan pengolahan data yang bersumber dari artikel, buku, jurnal, dan website yang berkaitan.

Data sekunder adalah sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. Sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal sebelumnya dan literatur.

3.5. Definisi Operasional

Tabel 3. 1 Definisi Operasional

No	Variabel	Pengertian	Indikator Pengukuran
1.	Kinerja Keuangan Daerah	Kinerja keuangan adalah derajat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi pendapatan dan pengeluaran daerah selama periode tertentu melalui sistem keuangan yang ditetapkan oleh suatu kebijakan.	Rasio efisiensi = (biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD)/(Realisasi penerimaan PAD) x 100%
2.	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan dari perusahaan daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang	Pendapatan Asli Daerah = Ln (Pendapatan Asli Daerah) (Maulina dkk., 2021)

³¹ Sumarjo, "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia."

		dipisahkan, dan pendapatan daerah lainnya yang sah, yang berfungsi untuk membiayai pembangunan Pendapatan Asli Daerah = Ln (Pendapatan Asli Daerah) (Maulina dkk., 2021) 47 daerah dan mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat (Mulyani & Wibowo 2017).	
3.	Ukuran Pemerintah Daerah	Size (ukuran) adalah jumlah dari total aset pemerintah daerah. Aset yang dimiliki dapat mendukung kinerja pemerintah daerah. Aset yang besar diharapkan mampu memberikan kontribusi kinerja yang besar. Pemerintah daerah dengan aset yang Size = Ln Total Aset Pemerintah Daerah (Wijayanti & Suryandari, 2020) 48 besar kemungkinan memiliki potensi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.	Size = Ln Total Aset Pemerintah Daerah (Wijayanti & Suryandari, 2020)
4.	Dana Perimbangan	Dana perimbangan adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana Perimbangan disebut juga dana transfer dari pemerintah	Dana Perimbangan = Ln (Dana Perimbangan) (Maulina dkk., 2021)

		yang berfungsi untuk mendukung pembiayaan otonomi daerah.	
--	--	---	--

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program perangkat lunak Eviews 10. Pada analisis data panel, beberapa langkah perlu dilakukan, diantaranya adalah :

3.6.1. Analisis Deskriptif

Teknik analisis data penelitian secara deskriptif dilakukan melalui statistika deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat generalisasi hasil penelitian. Termasuk dalam teknik analisis data deskriptif antara lain penyajian data melalui tabel, grafik, diagram, persentase, frekuensi, perhitungan mean, median atau modus.

3.6.2. Metode Estimasi Data Panel

Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan analisis data panel dengan bantuan software Eviews 10 dapat dilakukan menggunakan 3 pendekatan. antara lain: *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model*, dan *Random Effect Model*. Antara lain :

3.6.2.1 Common Effect Model (CEM)

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu sehingga diasumsikan bahwa perilaku data akan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa menggunakan pendekatan *Ordinary Least Square (OLS)* atau teknik kuadrat kecil untuk mengestimasi model data panel.

3.6.2.2 Fixed Effect Model (FEM)

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Model ini

mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intercept.

3.6.2.3 Random Effect Model (REM)

Model ini mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Keuntungan menggunakan model *Random effect* yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan teknik *Generalized Least Square* (GLS).

3.6.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Dari tiga model yang telah diestimasi melalui pendekatan *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect* akan dipilih model yang paling tepat. Pemilihan model dilakukan menggunakan uji formal, yaitu uji Chow dan uji Hausman.

3.6.3.1 Uji Chow (F test)

Uji chow digunakan untuk mengetahui model panel apa yang cocok untuk digunakan antara model *common effect* dan *fixed effect*. Uji ini digunakan untuk mengetahui perbandingan nilai probability F dengan signifikan. Jika nilai probability $F < 0,05$ maka model yang terpilih adalah model FEM dibandingkan dengan CEM. Sebaliknya apabila nilai probability $F > 0,05$ maka model terpilih yaitu model CEM yang lebih baik daripada model FEM.³²

3.6.3.2 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji Lagrange Multiplier Lagrange Multiplier (LM) adalah uji untuk mengetahui apakah model *Random Effect* atau model *Common Effect* yang paling tepat digunakan. Uji signifikansi Random Effect ini dikembangkan oleh Breusch Pagan. Metode Breusch Pagan untuk uji signifikansi *Random Effect* didasarkan

³² Amalia Yunia Rahmawati, *Pengaruh Debt To Equity Ratio, Return On Asset Dan Return On Equity Terhadap Return Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021)*”2023 no. July (2020): 1–23.

pada nilai residual dari metode OLS. Adapun nilai statistik LM dihitung berdasarkan formula sebagai berikut :

Dimana :

n = Jumlah individu

T = Jumlah periode waktu

e = Residual metode Common Effect (OLS)

Hipotesis yang digunakan adalah :

H_0 : Common Effect Model

H_1 : Random Effect Model

Uji LM ini didasarkan pada distribusi *chisquares* dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai LM statistik lebih besar dari nilai kritis statistik *chi-squares* maka kita menolak hipotesis nul, yang artinya estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah metode *Random Effect* dari pada metode *Common Effect*. Sebaliknya jika nilai LM statistik lebih kecil dari nilai statistik *chi-squares* sebagai nilai kritis, maka kita menerima hipotesis nul, yang artinya estimasi yang digunakan dalam regresi data panel adalah metode *Common Effect* bukan metode *Random Effect*.³³ Uji LM tidak digunakan apabila pada uji Chow dan uji Hausman menunjukkan model yang paling tepat adalah *Fixed Effect* Model. Uji LM dipakai manakala pada uji Chow menunjukkan model yang dipakai adalah *Common Effect* Model, sedangkan pada uji Hausman menunjukkan model yang paling tepat adalah *Random Effect* Model. Maka diperlukan uji LM sebagai tahap akhir untuk menentukan model *Common Effect* atau *Random Effect* yang paling tepat.³⁴

³³ Dessy Riani and Junita Putri Rajana Hrp, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Leverage, Ukuran Pemerintahan, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Pada Provinsi Sumatera Utara."

³⁴ Onibala, Rotinsulu, and Rorong, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara."

3.6.3.3 Uji Hausman

Uji hausman merupakan tes yang digunakan untuk memilih model yang paling tepat antara *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Uji ini digunakan untuk mengetahui perbandingan antara nilai probability *chi-square* dan signifikan. Jika nilai probability *chi-square* $< 0,05$ maka model yang terpilih adalah model FEM dibandingkan dengan REM. Sebaliknya jika nilai probability *chi-square* $> 0,05$ maka model REM yang terpilih dibandingkan model FEM

3.6.4 Uji Asumsi Klasik

3.6.4.1 Uji Multikolonieritas

Multikolonieritas adalah adanya hubungan linear yang sempurna di antara variabel yang menjelaskan model regresi. Untuk mengukur terjadinya multikolonieritas pada model regresi dilihat dari koefisien korelasi antara masing masing variabel bebas. Apabila koefisien > 0.08 , maka dalam model regresi terjadi multikolonieritas. Apabila terjadi multikolonieritas dalam teknik regresi, maka dapat mengakibatkan koefisien regresi tidak dapat ditentukan dan standar erornya tidak dapat didefinisikan. Selain itu, jika kolinearitas tinggi tetapi tidak sempurna, estimasi dari koefisien regresi masih dimungkinkan, namun nilai populasi dari koefisienkoefisien tidak dapat diestimasi dengan tepat.

3.6.4.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi tidak mengandung masalah ketidaksamaan varian. Biasanya masalah heteroskedastisitas terjadi pada data *cross section* dibandingkan dengan *time series*. Adapun metode yang digunakan untuk menentukan uji heteroskedastisitas adalah uji glejser. Uji glejser ini dilakukan untuk mengetahui heteroskedastisitas dengan ditentukan oleh nilai α . Untuk menguji terjadinya heteroskedastisitas atau tidak dilakukan dengan melakukan meregresikan nilai residual

absolut regresi pada masing-masing variabel bebas.³⁵ Jika nilai signifikansi thitung dari hasil regresi nilai residual absolut tersebut lebih dari 0,05 maka model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

3.6.5 Analisis Rregresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan data panel yang dimana data panel merupakan gabungan dari data time series dan data *cross section* sehingga metode yang digunakan pun khusus untuk data panel. Menurut Gujarati, menyatakan bahwa “Data panel (Pooled Data) atau yang disebut juga data *longitudinal* merupakan gabungan antara data *cross section* dan *data time series*.” Data *cross section* adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu. Sedangkan *data time series* adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Terdapat beberapa keunggulan dari data panel menurut Hsiao dan Klevmarken dalam Baltagi, yaitu :

1. Data panel dapat menjaga heterogenitas individual. *Data time series* dan *section* tidak menjaga heterogenitas tersebut, sehingga beresiko mendapatkan hasil yang bias.
2. Data panel lebih informatif, bervariasi, dan derajat bebas lebih besar sehingga lebih efisien.
3. Data panel lebih unggul dalam mempelajari perubahan dinamis.
4. Data panel lebih dapat mendeteksi dan mengukur pengaruh-pengaruh yang tidak terobservasi pada data *cross section* murni dan *time series* murni.
5. Data panel meminimalisasi bias

Selain keunggulan tersebut, menurut Verbeek, Gujarati, Wibisono, menyimpulkan bahwa “Keunggulan lain pada data panel yaitu data panel memiliki implikasi tidak harus dilakukan pengujian asumsi klasik”, maka data panel tidak membutuhkan pengujian asumsi klasik seperti

³⁵ Anggara Tama, “Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah , Ukuran Pemerintah , Dan Temuan Audit Terhadap Kinerja Keuangan Daerah I Gusti Made Ary Anggara Tama Pendahuluan Paradigma Pengelolaan Pemerintah Daerah Memulai Babak Baru Seiring.”

normalitas atau autokorelasi. Penjelasan lain mengapa tidak membutuhkan pengujian normalitas dan autokorelasi adalah sebagai berikut :

1. Uji normalitas hanya digunakan jika jumlah observasi adalah kurang dari 30, untuk mengetahui apakah eror term mendekati distribusi normal. Jika jumlah observasi lebih dari 30, maka tidak perlu dilakukan uji normalitas karena distribusi sampling eror term mendekati normal. Dalam penelitian ini menggunakan jumlah observasi 41 maka uji normalitas dapat diabaikan.
2. Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya. Metode *Generalized Least Square* (GLS) adalah sebuah metode untuk membuang autokorelasi urutan pertama pada sebuah estimasi persamaan regresi. Hal ini juga ditegaskan oleh Sarwoko, bahwa “penggunaan metode GLS dapat menekan adanya autokorelasi yang biasanya timbul dalam kesalahan estimasi varian sehingga dengan metode GLS masalah autokorelasi dapat diatasi.” Selain daripada itu, Gujarati juga menyatakan bahwa “penggunaan metode GLS dapat menekan autokorelasi yang biasanya timbul dalam rumus OLS (Ordinary Least Square) sebagai akibat dari kesalahan estimasi varians

3.6.6 Penguji hipotesis

3.6.6.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinan adalah suatu pengukuran yang menguji seberapa besar kemampuan semua variabel bebas (variabel independen) dalam menjelaskan variabel terikat (variabel dependen). Semakin besar nilai R^2 , semakin baik mencerminkan bahwa semakin besar presentase kontribusi nilai dari variabel bebas (variabel independen) terhadap variabel terikat (dependen). Hal ini tidak menambah kesempurnaan sebuah model dalam penelitian karena hal ini berdasarkan dengan penambahan

variabel. Semakin banyak variabel bebas (variabel independen) maka koefisien determinan (R^2) semakin besar.³⁶

3.6.6.2 Uji Hipotesis (Uji Statistik t)

Uji signifikansi parameter individual (uji statistik T) adalah uji perhitungan yang bertujuan untuk mengetahui masing-masing variabel bebas (variabel independen) berpengaruh terhadap variabel terikat (variabel dependen). Perhitungan uji ini dilihat dari jumlah *degree of freedom* dengan derajat kepercayaan 5%. Maka apabila nilai signifikansi dibawah 0,05 hipotesis penelitian ditolak. Selain itu, uji signifikansi parameter individual dapat dilakukan dengan membandingkan nilai statistik t-hitung dengan nilai t-tabel.³⁷

3.6.6.3 Uji F Uji signifikansi simultan

(Uji Statistik F) yaitu teknik perhitungan yang digunakan untuk menguji hubungan simultan terhadap semua variabel bebas (variabel independen) terhadap variabel terikat (variabel dependen). Dalam perhitungan uji statistik F terdapat dua macam perhitungan yaitu uji F dengan membandingkan uji F-tabel dan Uji F-hitung yang mana Ftabel diperoleh dari tabel F berdasarkan derajat kebebasan dan alfa. Perhitungan Uji F kedua yaitu dengan menggunakan nilai F dan nilai signifikansi sebesar 5%.³⁸

³⁶ Mercy Irene Christine Siregar, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Papua," *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis* 5, no. 1 (2020): 26–42.

³⁷ Nanda Dipa Prastiwi and Andri Waskita Aji, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah," *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha* 28, no. 1 (2020): 89–105.

³⁸ Ibid.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Karisidenan Pati

Objek dari penelitian ini adalah Karisidenan Pati merupakan wilayah administratif di Indonesia yang terletak di Jawa Tengah. Karisidenan Pati terdiri dari 6 kabupaten yaitu Kabupaten Pati, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, dan Kabupaten Blora. Luas wilayah Karisidenan Pati adalah sekitar 6.450,65 km² dengan jumlah penduduk sekitar 3,5 juta jiwa. Mayoritas penduduk Karisidenan Pati berprofesi sebagai petani, namun sektor industri dan perdagangan juga semakin berkembang.

Karisidenan Pati memiliki potensi wisata yang menarik seperti wisata religi seperti makam Sunan Kalijaga di Kabupaten Demak, wisata alam seperti Taman Nasional Karimunjawa di Kabupaten Jepara, dan wisata budaya seperti museum keramik di Kabupaten Kudus. Karisidenan Pati juga memiliki kekayaan budaya dan seni seperti tarian gambyong, tari reog, serta kain batik khas Pati dan Kudus. Karisidenan Pati juga terkenal dengan kuliner khasnya seperti nasi grombyang, kupat tahu, dan sate kambing.

Secara administratif, Karisidenan Pati berada di bawah pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Karisidenan Pati juga dilintasi oleh jalur kereta api dan jalan tol yang menghubungkan antar kabupaten di dalamnya dan dengan kota-kota besar di Jawa Tengah seperti Semarang dan Surabaya.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah daerah Karisidenan Pati memiliki nilai minimum sebesar 156.402.924.037 dan nilai maksimum sebesar 449.821.345.800. Nilai terendah terjadi di Kabupaten Blora pada tahun 2015 dan nilai tertinggi terjadi Di Kabupaten Pati tahun 2017.

Tabel 4. 1 Laporan Keuangan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Pati	Kudus	Jepara
2015	303.750.664.585	255.284.092.548	270.251.582.727
2016	314.921.084.791	279.239.106.717	322.509.753.285
2017	449.821.345.800	366.031.203.778	325.530.346.533
2018	384.041.846.939	337.364.609.424	369.330.454.700
2019	363.997.151.178	343.824.122.868	384.979.296.768
2020	371.708.005.192	383.892.971.961	419.363.320.517
2021	388.644.537.358	507.167.074.775	408.635.274.883

Sumber : <https://kuduskab.go.id>, <https://www.patikab.go.id>, <https://bpkad.jepara.go.id>,
<https://rembangkab.go.id/>,<https://ppid.blorakab.go.id/>,<https://dkpd.grobogan.go.id>
/

Tabel 4. 2 Laporan Keuangan Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Grobogan	Blora	Rembang
2015	272.718.439.175	156.402.924.037	193.122.759.857
2016	299.211.316.168	171.277.522.706	234.168.365.751
2017	440.456.238.668	280.042.019.102	300.319.284.807
2018	315.743.175.974	203.182.795.054	296.676.436.263
2019	344.559.032.450	246.863.066.484	308.445.489.137

2020	350.453.524.065	299.687.660.301	326.670.124.351
2021	424.186.340.266	326.770.477.077	404.100.646.579

Sumber: <https://kuduskab.go.id>, <https://www.patikab.go.id>, <https://bpkad.jepara.go.id>,
<https://rembangkab.go.id/>, <https://ppid.blorakab.go.id/>, <https://dkpd.grobogan.go.id>

2. Ukuran Pemerintah Daerah (size)

Ukuran pemerintah daerah (size) pada daerah Karisidenan Pati memiliki nilai minimum 1.632.557.326.614 dan nilai maksimum sebesar 6.674.428.413.015. Nilai terendah terjadi di Kabupaten Rembang pada tahun 2017 dan nilai tertinggi terjadi di Kabupaten Jepara tahun 2021.

Tabel 4. 3 Laporan Keuangan Aset Pemerintah Daerah

Tahun	Pati	Kudus	Jepara
2015	4.058.238.306.204	3.164.989.044.014	5.227.429.224.883
2016	5.620.068.520.754	3.490.967.658.002	5.184.523.020.253
2017	6.006.822.341.818	4.066.126.399.735	5.886.321.483.841
2018	6.190.923.149.284	4.159.213.413.942	6.132.256.105.265
2019	6.439.754.615.980	4.468.531.280.045	6.496.679.937.377
2020	6.254.897.635.666	4.670.496.301.415	6.626.878.048.525
2021	6.356.447.372.037	4.850.177.079.998	6.674.428.413.015

Sumber: <https://kuduskab.go.id>, <https://www.patikab.go.id>, <https://bpkad.jepara.go.id>,
<https://rembangkab.go.id/>, <https://ppid.blorakab.go.id/>, <https://dkpd.grobogan.go.id/>

Tabel 4. 4 Laporan Keuangan Aset Pemerintah Daerah

Tahun	Grobogan	Blora	Rembang
2015	2.110.181.560.904	2.200.545.645.447	1.632.557.326.614
2016	2.578.827.973.057	2.324.010.734.307	1.799.809.861.545
2017	2.327.558.507.348	2.546.335.225.938	1.699.744.280.051
2018	3.504.789.426.747	2.916.854.233.299	2.083.375.254.652
2019	3.642.816.444.595	3.362.562.896.874	2.143.033.080.690
2020	3.771.022.502.289	3.382.901.824.153	2.346.462.043.811
2021	4.133.213.033.679	3.536.211.050.649	2.504.076.268.460

Sumber: <https://kuduskab.go.id>, <https://www.patikab.go.id>, <https://bpkad.jepara.go.id>,
<https://rembangkab.go.id/>, <https://ppid.blorakab.go.id/>, <https://dkpd.grobogan.go.id/>

3. Dana Perimbangan

Dana perimbangan pada daerah Karisidenan Pati memiliki nilai minimum sebesar 852.722.349.235 dan nilai maksimum sebesar 1.853.501.732.035. Nilai terendah terjadi di Kabupaten Reambang tahun 2015 dan nilai tertinggi terjadi pada Kabupaten Grobogan tahun 2019.

Tabel 4. 5 Laporan Keuangan Dana Perimbangan Pemerintah Daerah

Tahun	Pati	kudus	Jebara
2015	1.214.974.988.666	1.033.505.128.258	1.105.150.447.896
2016	1.689.030.336.220	1.290.967.072.066	1.383.615.805.500
2017	1.579.434.897.397	1.310.924.033.469	1.316.698.615.037
2018	1.637.310.968.390	1.281.771.374.568	1.339.634.292.620
2019	1.637.460.890.857	1.298.060.004.624	1.393.154.748.566
2020	1.505.063.848.568	1.183.590.147.772	1.581.176.844.190
2021	1.519.385.725.982	1.239.890.567.326	1.642.016.699.042

Sumber: <https://kuduskab.go.id> , <https://www.patikab.go.id> , <https://bpkad.jepara.go.id> ,
<https://rembangkab.go.id/> , <https://ppid.blorakab.go.id/> , <https://dkpd.grobogan.go.id/>

Tabel 4. 6 Laporan Keuangan Dana Perimbangan Pemerintah Daerah

Tahun	Grobogn	Blora	Rembang
2015	1.186.214.542.310	1.019.665.153.124	852.722.349.235
2016	1.705.546.807.799	1.518.683.687.233	935.943.695.312
2017	1.759.723.293.511	1.348.442.240.943	927.645.131.515
2018	1.794.017.726.760	1.375.550.409.408	902.171.379.111
2019	1.853.501.732.035	1.441.716.460.262	1.051.964.945.792

2020	1.811.354.359.234	1.259.239.750.269	1.368.623.473.244
2021	1.846.533.214.438	1.406.481.782.693	1.299.326.523.909

Sumber: <https://kuduskab.go.id>, <https://www.patikab.go.id>, <https://bpkad.jepara.go.id>,
<https://rembangkab.go.id/>, <https://ppid.blorakab.go.id/>, <https://dkpd.grobogan.go.id>

4.2. Analisis Statistik Deskriptif

Hasil pengolahan dalam bentuk statistik deskriptif akan menampilkan karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jumlah sampel (n), rata-rata sampel (mean), nilai minimum dan maksimum, untuk masing-masing variabel penelitian. Berikut hasil analisis statistik dalam penelitian ini:

Gambar 4. 1 Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

	X1_PAD	X2_ASET	X3_PERIMBANGAN	Y1_KK
Mean	2648.500	2904.262	0.703333	1.065952
Median	2651.000	2899.500	0.720000	0.880000
Maximum	2695.000	3318.000	0.820000	8.640000
Minimum	2578.000	2812.000	0.580000	0.720000
Std. Dev.	25.18541	78.11282	0.061671	1.200451
Skewness	-0.877591	3.505676	-0.454557	6.193902
Kurtosis	3.759602	19.88814	2.636891	39.59416
Jarque-Bera	6.400899	585.1445	1.677088	2612.033
Probability	0.040744	0.000000	0.432340	0.000000
Sum	111237.0	121979.0	29.54000	44.77000
Sum Sq. Dev.	26006.50	250166.1	0.155933	59.08441
Observations	42	42	42	42

Sumber : data diolah

Penelitian ini menjelaskan pengaruh pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan berdasarkan bahwa diperoleh kesimpulan sebagai berikut, jumlah penelitian (observasi) dalam penelitian ini di ambil dari 6 Kabupaten (sampel) dan tiap-tiap Kabupaten di ambil 7 tahun yaitu pada tahun 2015-2021. Adapun hasil analisis statistik deskriptif adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan asli daerah

Profitabilitas yang di proksikan dengan Pendapatan asli daerah memiliki nilai minimum sebesar 2578.000 dan nilai maksimum sebesar 2695.000. Hasil ini menunjukkan besaran profitabilitas Kabupaten berada pada nilai 2578.000 sampai 2695.000 dengan rata-rata sebesar 2648.500.

2. Aset/Size

Profitabilitas yang di proksikan dengan Aset memiliki nilai minimum sebesar 2812.000 dan nilai maksimum sebesar 3318.000. Hasil ini menunjukkan besaran profitabilitas Kabupaten berada pada nilai 2812.000 sampai 3318.000 dengan rata-rata sebesar 2904.262.

3. Dana Perimbangan

Profitabilitas yang di proksikan dengan Dana Perimbangan memiliki nilai minimum sebesar 0.580000 dan nilai maksimum sebesar 0.820000. Hasil ini menunjukkan besaran profitabilitas Kabupaten berada pada nilai 0.580000 sampai 0,820000 dengan rata-rata sebesar 0.703333.

4. Kinerja Keuangan

Kinerja Keuangan pada Kabupaten memiliki nilai rata-rata sebesar 1.065952, Nilai terkecil sebesar 0.720000 dan nilai maksimum sebesar 8.640000.

4.3 Uji Pemilihan Model

Regresi data panel dilakukan dengan tiga model yaitu *Common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Masing-masing model memiliki kelebihan dan kekurangan. Pemilihan model tergantung kepada asumsi yang dipakai peneliti dan pemenuhan syarat-syarat pengolahan data statistik. Oleh karena itu langkah yang harus dilakukan adalah memilih model dari ketiga yang tersedia. Untuk pemilihan model regresi data panel terdapat acuan yang mendasar dari pengambilan keputusan sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Uji Pemilihan Model

Pengujian	Hasil	Keputusan
Uji Chow	Prob. < 0,05	FEM
	Prob. > 0,05	CEM
Uji Hausman	Prob. < 0,05	FEM
	Prob. > 0,05	REM
Uji Langrange Multiplier (LM)	Prob. > 0,05	CEM
	Prob. < 0,05	REM

4.3.1. Hasil Uji Chow

Dengan asumsi jika nilai *Cross-section Chi square* > 0,05 maka yang terpilih *Common Effect* Model menjadi model terbaik, tetapi jika *Cross-section Chi square* < 0,05 maka *Fixed Effect* Model menjadi model terbaik. Berikut hasil uji Chow:

Gambar 4. 2 Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.275201	(5,33)	0.2979
Cross-section Chi-square	7.419261	5	0.1913

Sumber: data diolah

Apabila nilai probabilitas $F > 0.05$ artinya H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang berarti model yang paling tepat digunakan adalah *common effect* (CEM). Namun jika nilai probabilitas $F < 0.05$ artinya H_1 diterima dan H_0 ditolak, yang berarti model yang paling tepat digunakan adalah *fixed effect*. Dari hasil uji chow pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai probabilitas

cross section adalah $0,1913 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Oleh karena itu model yang dipilih adalah *common effect*.

4.3.2. Hasil Uji Lagrange Multipler

Setelah ditemukan hasil dari uji chow yaitu model *common effect*, maka perlu dilakukan uji *Lagrange Multipler*. uji *Lagrange Multipler* dilakukan untuk menguji model yang lebih tepat untuk hasil dari uji *Lagrange Multipler* sebagai berikut:

Gambar 4. 3 Hasil Uji Lagrange Multipler

Lagrange multiplier (LM) test for panel data			
Date: 09/16/23 Time: 14:09			
Sample: 2015 2021			
Total panel observations: 42			
Probability in ()			
Null (no rand. effect)	Cross-section	Period	Both
Alternative	One-sided	One-sided	
Breusch-Pagan	0.004035 (0.9493)	0.416087 (0.5189)	0.420122 (0.5169)
Honda	-0.063525 (0.5253)	-0.645048 (0.7406)	-0.501037 (0.6918)
King-Wu	-0.063525 (0.5253)	-0.645048 (0.7406)	-0.481807 (0.6850)
GHM	-- --	-- --	0.000000 (0.7500)

Sumber: data diolah

Dalam melakukan uji *Lagrange Multipler* hipotesis yang digunakan yaitu apabila nilai probabilitas Chi-Square > 0.05 artinya H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang berarti model regresi yang paling tepat digunakan adalah *common effect*. Namun jika probabilitas Chi-Square < 0.05 artinya H_1 diterima dan H_0 ditolak, yang berarti model regresi yang paling tepat digunakan adalah *random effect*. Berdasarkan hasil uji *Lagrange Multipler* di atas, dapat dilihat dari nilai probabilitas *Cross-section* random yakni sebesar $0,9493 > 0,05$, ini berarti H_1 ditolak dan H_0 diterima sehingga model yang dipilih adalah *common effect* (CEM).

4.4. Uji Asumsi Klasik

Hasil dari Uji LM menunjukkan model yang terpilih adalah *Common Effect Model* (CEM) maka dari itu uji asumsi klasik harus dilakukan.

4.4.1. Uji Multikoleniaritas

Uji multikolinearitas diperlukan untuk memenuhi apakah model regresi menemukan kesamaan antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan kesamaan atau korelasi antar variabel. Dengan adanya uji multikolinearitas dalam penelitian ini dapat dideteksi dengan cara menggunakan kolerasi antar variabel independen, Berikut hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini:

Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikorelasi

	X ₁	X ₂	X ₃
X ₁	1.000000	0.293623	-0.281245
X ₂	0.293623	1.000000	-0.083068
X ₃	-0.281245	-0.083068	1.000000

Sumber: Data Diolah

Koefisien korelasi X₁ dan X₂ sebesar 0,293623 < 0,85, X₁ dan X₃ sebesar -0,281245 < 0,85 dan X₂ dan X₃ sebesar -0,083069 < 0,85. Maka dapat disimpulkan bahwa terbebas multikoleniaritas atau lolos uji multikoleniaritas.³⁹

4.4.2. Heteroskedastisitas

Uji Heterokedasitas dilakukan untuk mengetahui ketidaksamaan variabel pengganggu dari suatu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Regresi yang tidak terjadi heteroskedasitas ialah regresi yang baik. Dengan asumsi nilai jika nilai probabilitas < 0,05 maka terdapat heterokedasitas, jika nilai probabilitas > 0,05 maka tidak terdapat heterokedasitas. Berikut

³⁹ Diana Fungsi1, Cris Kuntadi2, Rahmat Pramukty *Pengaruh Return Saham, Tata Kelola Perusahaan, Kinerja Keuangan Terhadap Opini Audit Going Concern Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021* Vol.2 2023

hasil uji heterokedasitas.

Gambar 4. 4 Hasil Uji Heterokedasitas

Dependent Variable: ABS(RESID)
Method: Panel Least Squares
Date: 08/05/23 Time: 03:38
Sample: 2015 2021
Periods included: 7
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 42

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17.70219	20.00359	0.884951	0.3817
X1	-0.009538	0.007589	-1.256824	0.2165
X2	0.002333	0.002356	0.990008	0.3284
X3	1.642193	2.972859	0.552395	0.5839

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel diatas terlihat masing-masing variabel yaitu X₁ (Pad), X₂ (Aset), X₃ (Perimbangan), 0,2165, 0,3284 dan 0,5839, ketiga variabel memiliki angka melebihi standar 0,05, sehingga dapat diasumsikan jika penelitian dalam pengujian ini tidak terindikasi gejala heteroskedastisitas.

4.5. Pengujian Regresi Data Panel

Setelah dilakukan model yang digunakan dala penelitian data panel yaitu *Common Effect Model* (CEM), selanjutnya ialah Uji Regresi Data Panel yang dilakukan untuk mengetahui apakah variabel pendapatan asli daerah, Ukuuran pemerintah daerah, dana perimbangan memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja keuangan. Berikut ini hasil dari uji regresi data panel CEM.

Persamaan Regresi Data Panel CEM:

Estimation Equation:

=====

$$Y = C(1) + C(2)*X_1 + C(3)*X_2 + C(4)*X_3$$

Substituted Coefficients:

=====

$$Y = 16.1297740493 - 0.00725878417973(X_1) + 0.0012702913114(X_2) + 0.670819291086(X_3)$$

$$Y=16.1297 + (-0.01) + 0.01 + 0.67$$

Adapun Penjelasanya sebagai berikut :

- A. Nilai Konstanta sebesar 16,1297 artinya apabila X_1 (Pad), X_2 (Aset), X_3 (Dana Perimbangan) maka variabel kinerja keuangan(Y) akan naik sebesar 16.129774
- B. Jika Pad(X_1) naik 1% maka kinerja keuangan (Y) akan turun sebesar sekitar 0,007258
- C. Jika Aset(X_2) naik 1% maka kinerja keuangan (Y) akan naik sebesar sekitar 0.001270
- D. Jika Dana Perimbangan(X_3) naik 1% maka kinerja keuangan (Y) akan naik sebesar sekitar 0.670819

4.6. Uji Hipotesis

4.6.1. Hasil Uji-t

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing – masing variabel Independen X_1 (Pad), X_2 (Aset), X_3 (Perimbangan) maka terhadap variabel dependen Y (variabel Rasio Efesiensi) . Apabila nilai probabilitas t lebih kecil dari 0.05, maka hasilnya signifikan berarti terdapat pengaruh dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Selain itu, uji signifikansi parameter individual dapat dilakukan dengan membandingkan nilai statistik t-hitung dengan nilai ttabel.

Gambar 4. 5 Hasil Uji T

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 08/05/23 Time: 03:48
Sample: 2015 2021
Periods included: 7
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 42

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	16.12977	21.84818	0.738266	0.4649
X1	-0.007259	0.008289	-0.875748	0.0910
X2	0.001270	0.002573	0.493608	0.0102
X3	0.670819	3.246995	0.206597	0.0032

Sumber: data diolah

Pengaruh Variabel Independen terhadap dependen secara parsial adalah sebagai berikut:

- A Hasil uji variabel X₁(Pad) diperoleh nilai t hitung sebesar -0.875748 < ttabel yaitu 2,02107539 dan nilai sig. **0,0910** > 0,05, maka H₀ ditolak dan H_a diterima, artinya secara parsial variabel pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan .
- B Hasil uji variable X₂ (Aset) diperoleh nilai t hitung sebesar 0,493608 < ttabel yaitu 2,02107539 dan nilai sig. **0,0102** < 0,05, maka H₀ ditolak dan H_a diterima, artinya variabel ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja keuangan.
- C Hasil uji variabel X₃(Perimbangan) diperoleh nilai t hitung sebesar 0,206597 < ttabel yaitu 2,02107539 dan nilai sig. **0,0032** < 0,05, maka H₀ ditolak dan H_a diterima, artinya variabel dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja keuangan.

4.6.2. Hasil Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas (F-sataistik) dengan tingkat

signifikan 0,05 atau 5%.

- a) Jika probability $F > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, artinya secara simultan tidak dapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b) Jika probability $F < 0,05$ maka H_0 Ditolak dan H_1 Diterima artinya simultan terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Gambar 4. 6 Hasil Uji F

R-squared	0.984218
Adjusted R-squared	0.972911
S.E. of regression	0.418722
Sum squared resid	4.938373
Log likelihood	-12.93764
F-statistic	3.421103
Prob(F-statistic)	0.000021

Sumber: data diolah

Nilai F hitung sebesar $3,421103 > F$ tabel yaitu $2,02107539$ dan nilai sig **0,000021** $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima secara simultan, artinya variabel pendapatan asli daerah, Aset dan Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja keuangan.

4.6.3. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat.

Gambar 4. 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.984218
Adjusted R-squared	0.972911
S.E. of regression	0.418722
Sum squared resid	4.938373
Log likelihood	-12.93764
F-statistic	3.421103
Prob(F-statistic)	0.000021

Sumber: data diolah

Nilai adjusted R Square sebesar 0,972911 atau 97,2911%. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independent yang terdiri dari Pad, Aset dan Perimbangan mampu menjelaskan variabel Rasio Efesiensi sebesar 97,2911%, sedangkan sisanya yaitu 2,7089 % (100 – nilai adjusted R Square) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.7. Pembahasan Hasil Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah yang berada di Provinsi Karisidenan pati yaitu sebanyak 6 kabupaten. Adapun variabel apa saja yang digunakan yaitu untuk variabel bebas Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah Dan Dana Perimbangan. Kemudian variabel terikat yang digunakan yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Pengujian berdasarkan uji Instrumen yang terdiri dari Analisis Statistik Deskriptif, Uji Pemilihan Model, Hasil Uji Chow, Hasil Uji Lagrange Multiplier, Uji Asumsi Klasik, Uji Multikoleniaritas, Heteroskedastisitas, Pengujian Regresi Data Panel, Uji Hipotesis, Hasil Uji-t dan Hasil Uji F, Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) menyatakan data panel terhadap sebanyak 6 kabupaten dikatakan valid karena secara simultan variabel memenuhi kriteria rhitung melebihi rtabel yang sudah ditentukan.

Hasil pengujian Analisis Statistik Deskriptif Profitabilitas Pendapatan asli daerah memiliki nilai minimum sebesar 2578.000 dan nilai maksimum sebesar 2695.000. Profitabilitas Aset memiliki nilai minimum sebesar 2812.000 dan nilai maksimum sebesar 3318.000. Profitabilitas Dana Perimbangan memiliki nilai minimum sebesar 0.580000 dan nilai maksimum sebesar 0.820000. Kinerja Keuangan pada Kabupaten memiliki nilai rata-rata sebesar 1.065952, Nilai terkecil sebesar 0.720000 dan nilai maksimum sebesar 8.640000. Dari hasil uji chow menunjukkan bahwa nilai probabilitas cross section adalah $0,1913 > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Oleh karena itu model yang dipilih adalah *common effect*.

Berdasarkan hasil uji Lagrange Multiplier di atas, dapat dilihat dari nilai probabilitas *Cross-section random* yakni sebesar $0,9493 > 0,05$, ini berarti H_1 ditolak dan H_0 diterima sehingga model yang dipilih adalah *common effect* (CEM). Hasil dari Uji LM menunjukkan model yang terpilih adalah *Common Effect Model* (CEM) maka dari itu uji asumsi klasik harus dilakukan. Koefisien korelasi X_1 dan X_2 sebesar $0,293623 < 0,85$, X_1 dan X_3 sebesar $-0,281245 < 0,85$ dan X_2 dan X_3 sebesar $-0,083069 < 0,85$. Maka dapat disimpulkan bahwa terbebas multikoleniaritas atau lolos uji multikoleniaritas.

Berdasarkan tabel diatas terlihat masing-masing variabel yaitu X_1 (Pad), X_2 (Aset), X_3 (Perimbangan), 0,2165, 0,3284 dan 0,5839, ketiga variabel memiliki angka melebihi standar 0,05, sehingga dapat diasumsikan jika penelitian dalam pengujian ini tidak terindikasi gejala heteroskedastisitas. Nilai Konstanta sebesar 16,1297 artinya apabila X_1 (Pad), X_2 (Aset), X_3 (Dana Perimbangan) maka variabel kinerja keuangan (Y) akan naik sebesar 16.129774. Jika Pad (X_1) naik 1% maka kinerja keuangan (Y) akan turun sebesar sekitar 0,007258. Jika Aset (X_2) naik 1% maka kinerja keuangan (Y) akan naik sebesar sekitar 0.001270. Jika Dana Perimbangan (X_3) naik 1% maka kinerja keuangan (Y) akan naik sebesar sekitar 0.670819

Nilai F hitung sebesar $3,421103 > F$ tabel yaitu $2,02107539$ dan nilai sig $0,000021 < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima secara simultan, artinya variabel pendapatan asli daerah, Aset dan Perimbangan berpengaruh terhadap Rasio Efesiensi. Nilai adjusted R Square sebesar $0,972911$ atau $97,2911\%$. Nilai koefisien determinasi tersebut menunjukkan bahwa variabel independent yang terdiri dari Pad, Aset dan Perimbangan mampu menjelaskan variabel Rasio Efesiensi sebesar $97,2911\%$, sedangkan sisanya yaitu $2,7089\%$ ($100 - \text{nilai adjusted R Square}$) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.7.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Variabel pendapatan asli daerah (Pad) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efisiensi. Arah koefisien regresi menunjukkan arah negatif dengan nilai koefisien regresi sebesar $0,007258$. Jika ditinjau dari perhitungan uji t pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa variabel (X_1) yaitu pas memperoleh nilai t-statistik sebesar $-0,87574$ dengan tingkat probabilitas $0,0910 > 0,05$. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa H_1 yang menyatakan variabel pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Tingginya pendapatan asli daerah yang dihasilkan oleh suatu daerah dapat meminimalisir ketergantungan daerah terhadap dana yang bersumber dari pemerintah pusat karena pemerintah daerah yang menghasilkan pendapatan asli daerah yang tinggi akan mempunyai keputusan yang bijak dalam menggunakan pendapatan asli daerah yaitu digunakan sesuai dengan kebutuhan dan pembangunan, peningkatan pendapatan daerah dapat meningkatkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri segala kegiatan pemerintahannya sehingga akan menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kinerja yang baik.

adanya pengaruh negatif antara Pad dan kinerja keuangan, ada beberapa faktor.⁴⁰

Tingkat Ketergantungan pada Pad, Jika suatu daerah sangat bergantung pada Pad sebagai sumber utama pendapatan, maka fluktuasi dalam Pad dapat memiliki dampak negatif pada kinerja keuangan. Ketidakstabilan pendapatan dari sumber tunggal dapat menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan anggaran dan pengeluaran, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Kualitas manajemen keuangan daerah juga dapat memengaruhi kinerja keuangan. Jika manajemen keuangan tidak efisien atau transparan, sumber pendapatan seperti Pad dapat digunakan secara tidak efektif, sehingga menghasilkan kinerja keuangan yang buruk. Komposisi Pad daerah juga dapat memainkan peran penting. Jika sebagian besar Pad berasal dari pajak tertentu yang mudah terpengaruh oleh fluktuasi ekonomi, misalnya pajak properti yang sangat bergantung pada kondisi pasar properti, maka kinerja keuangan dapat terpengaruh secara negatif saat kondisi ekonomi memburuk. Faktor eksternal, seperti perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah pusat yang mempengaruhi Pad daerah, juga dapat memainkan peran dalam kinerja keuangan. Perubahan aturan atau pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat dapat berdampak negatif pada Pad dan kinerja keuangan daerah. Kinerja Ekonomi Umum: Kondisi ekonomi umum di suatu negara atau wilayah juga dapat mempengaruhi Pad dan kinerja keuangan daerah. Saat ekonomi melemah, Pad dapat menurun karena bisnis dan warga mungkin menghadapi kesulitan keuangan yang mengurangi kemampuan mereka untuk membayar pajak atau retribusi.

⁴⁰ Nugraheni and Adi, "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: STUDI META-ANALISIS."

4.7.2. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah (Size) Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Variabel ukuran pemerintah daerah (size) dalam Penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Arah koefisien regresi menunjukkan arah positif dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.001270. Jika ditinjau dari perhitungan uji t pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa variabel (X2) yaitu pas memperoleh nilai t- statistik sebesar 0,493608 dengan tingkat probability $0,0102 < 0,05$. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa H2 yang menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah.

Ukuran pemerintah daerah yang diukur menggunakan total aset berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio efisiensi. Hal ini berarti semakin besar total aset yang dimiliki pemerintah daerah Jawa Tengah semakin tinggi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena peran total aset dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah sudah dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja keuangan. Ini berarti bahwa semakin besar ukuran pemerintah daerah, semakin baik kinerja keuangannya. Temuan ini konsisten dengan literatur yang menyatakan bahwa pemerintah daerah yang lebih besar memiliki lebih banyak sumber daya untuk mengelola keuangan mereka dengan lebih efektif.

4.3.2 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Daerah

Variabel dana perimbangan dalam penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan rasio efisiensi. Selain itu untuk arah koefisien regresi menunjukkan arah positif dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.670819. Jika ditinjau dari perhitungan uji t pada tabel 4.5 menunjukkan

bahwa variabel (X3) yaitu pas memperoleh nilai t- statistik sebesar 0.206597 dengan tingkat probability $0,0032 < 0,05$. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa H3 yang menyatakan variabel dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan.

Dana Perimbangan adalah alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka mendukung otonomi daerah dan pembangunan di tingkat regional. Kinerja keuangan mengacu pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dan mencapai tujuan pembangunan ekonomi dan sosial. Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah karena jumlah dana perimbangan yang tinggi akan menyebabkan kinerja keuangan daerah terutama pada koefisien daerah dalam mengelola daerahnya sendiri. Semakin besar dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah maka dapat mencerminkan tingkat efisien keuangan daerah tinggi karena ketergantungan yang rendah sehingga membuat pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam penggunaan sumber pendapatan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah pengaruh pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah (size) dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan daerah karesidenan pati tahun 2015-2021. Dari hasil penelitian yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Kabupaten yang ada di Karesidenan Pati pada tahun 2015-2021.
2. Variabel ukuran pemerintah daerah (size) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Karesidenan Pati pada tahun 2015-2021.
3. Variabel dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah Karesidenan Pati pada tahun 2015-2021.

5.2 Saran-Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, maka disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian selanjutnya semakin memperluas populasi yang digunakan, tidak hanya berfokus pada pemerintah daerah Karesidenan Pati saja, tetapi daerah-daerah yang lainnya, serta dapat menambah jumlah sampel penelitian dengan menambahkan periode tahun terbaru.
2. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan analisis pengukuran yang lain, seperti rasio efektivitas, rasio kemandirian dan analisis rasio yang lain.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti menggunakan populasi pemerintah daerah Karesidenan Pati di pada periode 7 tahun terakhir. Akan tetapi ada beberapa kabupaten yang tidak mempublikasikan laporan keuangannya pada web pemerintah kabupaten.

2. Sampel penelitian terbatas pada Pemerintah Daerah Karesidenan Pati. Sehingga menyebabkan hasil penelitian hanya berlaku untuk Kabupaten yang menjadi sampel penelitian. Sehingga hasil ini tidak dapat digeneralisasikan untuk semua Pemerintah Daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Yunia Rahmawati. Pengaruh Debt To Equity Ratio, Return On Asset Dan Return On Equity Terhadap Return Saham (Studi Kasus Pada Perusahaan Sub Sektor Perbankan Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2021)” no. July (2020): 1–23.
- Angel Siti Fatimah, Adik, and Nunung Aini Rahmah. “Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan.” *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 1, no. 3 (2022): 419–438.
- Anggara Tama, I Gusti. “Pengaruh Karakteristik Kepala Daerah , Ukuran Pemerintah , Dan Temuan Audit Terhadap Kinerja Keuangan Daerah I Gusti Made Ary Anggara Tama Pendahuluan Paradigma Pengelolaan Pemerintah Daerah Memulai Babak Baru Seiring.” *Perspektif Akuntansi* 1, no. Oktober (2018): 91–113.
- Antari, Ni Putu Gina Sukma, and Ida Bagus Panji Sedana. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana* 7, no. 2 (2018): 1080.
- Azis, Asmaul. *PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Di Jawa Timur)*, 2016.
<http://ejournal.stiedewantara.ac.id/>.
- Dessy Riani, and Junita Putri Rajana Hrp. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Leverage, Ukuran Pemerintahan, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Pada Provinsi Sumatera Utara.” *Jurnal Akuntansi Audit Dan Perpajakan Indonesia (Jaapi)* 3, no. 1 (2022): 311–317.
- Dwi Saraswati, S.Pd, M.Si, and CA Yunita Sari Rioni, SE, M.Si, Ak. “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, UKURAN PEMERINTAH DAERAH, LEVERAGE, TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH” (n.d.).

Karlinda, Ai Elis, Putri Azizi, and Mardhatila Fitri Sopali. "Pengaruh Pengalaman Kerja, Prestasi Kerja, Pendidikan Dan Pelatihan Terhadap Pengembangan Karir Pada PT. PLN (Persero) Kota Padang Rayon Kuranji." *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*. 5, no. 2 (2021): 523–531. <http://dx.doi.org/10.18415/ijmmu.v7i8.1809>.

Maiyora, Gita, Pembimbing : Yusralaini, and Riska Natariasari. *PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DARAH KABUPATEN/KOTA (STUDI EMPIRIS KABUPATEN/KOTA DI PULAU SUMATERA)*. *Jom FEKON*. Vol. 2, 2015.

Nugraheni, Eviniar, and Priyo Hari Adi. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH: STUDI META-ANALISIS." *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* 20, no. 1 (April 30, 2020): 19–42.

Onibala, Anjelia, Tri Oldy Rotinsulu, and Ita Pingkan F. Rorong. "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara." *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* 22, no. 2 (2021): 67–89.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jpekd/article/view/35097/32880>.

Pendapatan, Pengaruh, Asli Daerah, and D A N Leverage Terhadap. "Perimbangan , Ukuran Pemerintah Kinerja Keuangan Pemerintah" (2023).

Polii, I R A, D P E Saerang, S J Tangkuman, Imanuel R A Polii, Jurusan Akuntansi, and Fakultas Ekonomi. "Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Berdasarkan Konsep Value for Money." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 8, no. 4 (2020): 781–788.

Prabawati, Puspita Sari Surya, and Eva Wany. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating

Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2015.” *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi* XV, no. 1 (2018): 1.

Prastiwi, Nanda Dipa, and Andri Waskita Aji. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.” *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha* 28, no. 1 (2020): 89–105.

Sesotyaningtyas, Mirna, Jurusan Akuntansi, and Fakultas Ekonomi. “Accounting Analysis Journal.” *AAJ* 1, no. 1 (2012).
<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>.

Simamora, Winanda Chyntia, and Gideon Setyo Budiwitjaksono. “Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2020.” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 6, no. 2 (2022): 410.

Siregar, Mercy Irene Christine. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Papua.” *Jurnal Aplikasi Manajemen, Ekonomi dan Bisnis* 5, no. 1 (2020): 26–42.

Sumarjo, Hendro. “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia.” *Skripsi Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sebelas Maret. Surakarta* (2010): 1–76.

LAMPIRAN LAMPIRAN

Data Pendapatan Asli Daerah

KABUPATEN	TAHUN	PAD	LN
Pati	2015	303.750.664.585	26,44
	2016	314.921.084.791	26,48
	2017	449.821.345.800	26,83
	2018	384.041.846.939	26,67
	2019	363.997.151.178	26,62
	2020	371.708.005.192	26,64
	2021	388.644.537.358	26,69
Kudus	2015	255.284.092.548	26,27
	2016	279.239.106.717	26,36
	2017	366.031.203.778	26,63
	2018	337.364.609.424	26,54
	2019	343.824.122.868	26,56
	2020	383.892.971.961	26,67
	2021	507.167.074.775	26,95
Jepara	2015	270.251.582.727	26,32
	2016	322.509.753.285	26,50
	2017	325.530.346.533	26,51
	2018	369.330.454.700	26,63
	2019	384.979.296.768	26,68
	2020	419.363.320.517	26,76
	2021	408.635.274.883	26,74
Grobogan	2015	272.718.439.175	26,33
	2016	299.211.316.168	26,42
	2017	440.456.238.668	26,81
	2018	315.743.175.974	26,48
	2019	344.559.032.450	26,57
	2020	350.453.524.065	26,58
	2021	424.186.340.266	26,77
Blora	2015	156.402.924.037	25,78
	2016	171.277.522.706	25,87
	2017	280.042.019.102	26,36
	2018	203.182.795.054	26,04
	2019	246.863.066.484	26,23
	2020	299.687.660.301	26,43
	2021	326.770.477.077	26,51
Rembang	2015	193.122.759.857	25,99
	2016	234.168.365.751	26,18
	2017	300.319.284.807	26,43
	2018	296.676.436.263	26,42

	2019	308.445.489.137	26,45
	2020	326.670.124.351	26,51
	2021	404.100.646.579	26,72

Data Aset Pemerintah Daerah

KABUPATEN	TAHUN	ASET	LN
Pati	2015	4.058.238.306.204	29,03
	2016	5.620.068.520.754	29,36
	2017	6.006.822.341.818	29,42
	2018	6.190.923.149.284	29,45
	2019	6.439.754.615.980	29,49
	2020	6.254.897.635.666	29,46
	2021	6.356.447.372.037	29,48
Kudus	2015	3.164.989.044.014	28,78
	2016	3.490.967.658.002	28,88
	2017	4.066.126.399.735	29,03
	2018	4.159.213.413.942	29,06
	2019	4.468.531.280.045	29,13
	2020	4.670.496.301.415	29,17
	2021	4.850.177.079.998	29,21
Jepara	2015	5.227.429.224.883	29,28
	2016	5.184.523.020.253	29,28
	2017	5.886.321.483.841	29,40
	2018	6.132.256.105.265	29,44
	2019	6.496.679.937.377	29,50
	2020	6.626.878.048.525	29,52
	2021	6.674.428.413.015	29,53
Grobogan	2015	2.110.181.560.904	28,38
	2016	2.578.827.973.057	28,58
	2017	2.327.558.507.348	28,48
	2018	3.504.789.426.747	28,89
	2019	3.642.816.444.595	28,92
	2020	3.771.022.502.289	28,96
	2021	4.133.213.033.679	29,05
Blora	2015	2.200.545.645.447	28,42
	2016	2.324.010.734.307	28,47
	2017	2.546.335.225.938	28,57
	2018	2.916.854.233.299	28,70
	2019	3.362.562.896.874	28,84
	2020	3.382.901.824.153	28,85
	2021	3.536.211.050.649	28,89
Rembang	2015	1.632.557.326.614	28,12
	2016	1.799.809.861.545	28,22
	2017	1.699.744.280.051	28,16

	2018	2.083.375.254.652	28,37
	2019	2.143.033.080.690	28,39
	2020	2.346.462.043.811	28,48
	2021	2.504.076.268.460	28,55

Dana Perimbangan Pemerintah Daerah

KABUPATEN	TAHUN	PERIMBANGAN	LN
Pati	2015	1.214.974.988.666	00,75
	2016	1.689.030.336.220	00,80
	2017	1.579.434.897.397	00,70
	2018	1.637.310.968.390	00,59
	2019	1.637.460.890.857	00,58
	2020	1.505.063.848.568	00,74
	2021	1.519.385.725.982	00,73
Kudus	2015	1.033.505.128.258	00,74
	2016	1.290.967.072.066	00,73
	2017	1.310.924.033.469	00,72
	2018	1.281.771.374.568,00	00,71
	2019	1.298.060.004.624,00	00,71
	2020	1.183.590.147.772	00,70
	2021	1.239.890.567.326,00	00,65
Jepara	2015	1.105.150.447.896,00	00,73
	2016	1.383.615.805.500	00,73
	2017	1.316.698.615.037	00,67
	2018	1.339.634.292.620	00,59
	2019	1.393.154.748.566	00,58
	2020	1.581.176.844.190	00,68
	2021	1.642.016.699.042	00,69
Grobogan	2015	1.186.214.542.310,00	00,78
	2016	1.705.546.807.799,00	00,77
	2017	1,75972E+12	00,73
	2018	1.794.017.726.760	00,74
	2019	1.853.501.732.035	00,73

	2020	1.811.354.359.234	00,72
	2021	1.846.533.214.438	00,70
Blora	2015	1.019.665.153.124,00	00,62
	2016	1.518.683.687.233	00,82
	2017	1.348.442.240.943	00,67
	2018	1.375.550.409.408	00,66
	2019	1.441.716.460.262	00,66
	2020	1.259.239.750.269	00,59
	2021	1.406.481.782.693	00,63
Rembang	2015	852.722.349.235	00,80
	2016	935.943.695.312,00	00,78
	2017	927.645.131.515,00	00,76
	2018	902.171.379.111,00	00,73
	2019	1.051.964.945.792,00	00,72
	2020	1.368.623.473.244,00	00,73
	2021	1.299.326.523.909,00	00,68

Hasil analisis statistik deskriptif

	X1_PAD	X2_ASET	X3_PERIMBANGAN	Y1_KK
Mean	2648.500	2904.262	0.703333	1.065952
Median	2651.000	2899.500	0.720000	0.880000
Maximum	2695.000	3318.000	0.820000	8.640000
Minimum	2578.000	2812.000	0.580000	0.720000
Std. Dev.	25.18541	78.11282	0.061671	1.200451
Skewness	-0.877591	3.505676	-0.454557	6.193902
Kurtosis	3.759602	19.88814	2.636891	39.59416
Jarque-Bera	6.400899	585.1445	1.677088	2612.033
Probability	0.040744	0.000000	0.432340	0.000000
Sum	111237.0	121979.0	29.54000	44.77000
Sum Sq. Dev.	26006.50	250166.1	0.155933	59.08441
Observations	42	42	42	42

Hasil uji chow

Redundant Fixed Effects Tests			
Equation: Untitled			
Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	1.275201	(5,33)	0.2979
Cross-section Chi-square	7.419261	5	0.1913

Hasil uji lagrange multipler

Lagrange multiplier (LM) test for panel data			
Date: 09/16/23 Time: 14:09			
Sample: 2015 2021			
Total panel observations: 42			
Probability in			
Null (no rand. effect)	Cross-section	Period	Both
Alternative	One-sided	One-sided	
Breusch-Pagan	0.004035 (0.9493)	0.416087 (0.5189)	0.420122 (0.5169)
Honda	-0.063525 (0.5253)	-0.645048 (0.7406)	-0.501037 (0.6918)
King-Wu	-0.063525 (0.5253)	-0.645048 (0.7406)	-0.481807 (0.6850)
GHM	-- --	-- --	0.000000 (0.7500)

Hasil uji multikoleransi

	X ₁	X ₂	X ₃
X ₁	1.000000	0.293623	-0.281245
X ₂	0.293623	1.000000	-0.083068
X ₃	-0.281245	-0.083068	1.000000

Hasil uji heteroskedastisitas

Dependent Variable: ABS(RESID)
Method: Panel Least Squares
Date: 08/05/23 Time: 03:38
Sample: 2015 2021
Periods included: 7
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 42

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17.70219	20.00359	0.884951	0.3817
X1	-0.009538	0.007589	-1.256824	0.2165
X2	0.002333	0.002356	0.990008	0.3284
X3	1.642193	2.972859	0.552395	0.5839

Hasil uji T

Dependent Variable: Y
Method: Panel Least Squares
Date: 08/05/23 Time: 03:48
Sample: 2015 2021
Periods included: 7
Cross-sections included: 6
Total panel (balanced) observations: 42

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	16.12977	21.84818	0.738266	0.4649
X1	-0.007259	0.008289	-0.875748	0.0910
X2	0.001270	0.002573	0.493608	0.0102
X3	0.670819	3.246995	0.206597	0.0032

Hasil Uji F

R-squared	0.984218
Adjusted R-squared	0.972911
S.E. of regression	0.418722
Sum squared resid	4.938373
Log likelihood	-12.93764
F-statistic	3.421103
Prob(F-statistic)	0.000021

Hasil uji koefisien determinasi

R-squared	0.984218
Adjusted R-squared	0.972911
S.E. of regression	0.418722
Sum squared resid	4.938373
Log likelihood	-12.93764
F-statistic	3.421103
Prob(F-statistic)	0.000021
